

PENDIDIKAN PESANTREN SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENDIDIKAN NASIONAL

Muhammad Nasrul Waton

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

E-mail: naswahana78@gmail.com

Abstract: In the history of life, education is a most essential requirement for the survival of mankind. Role-education in addition to functioning in developing creativity and productivity, also plays a major role in efforts to develop morality and the planting of values, both human values and divine values. Pesantren is an educational institution that has a long and unique history. Historically, pesantren has included the earliest Islamic education and still survives to this day. Of the many types of boarding schools, in conducting education and teaching for students, in general can be grouped into two forms of pesantren: (1) Pesantren Salafiyah (2) Pesantren Khalafiyah. Education, as set forth in RI Law no. 20 Year 2003 Article 1 paragraph 1, is a conscious and planned effort to create an atmosphere of learning and learning process so that learners actively develop their potential to have spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, as well as the skills needed by him or her, society, nation and state. Indonesia national education system is based on the culture of the nation of Indonesia and based on Pancasila and the 1945 Constitution as a crystallization of the values of life of the Indonesian nation.

Keywords: Pesantren, Indonesia National Education

Pendahuluan

Dalam sejarah kehidupan masyarakat, pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang paling hakiki bagi kelangsungan hidup umat manusia. Karena dengan pendidikanlah manusia mampu mengantarkan hidupnya secara ideal. Pendidikan juga merupakan penolong utama bagi manusia untuk menjalani hidup ini. Karena tanpa pendidikan, manusia

sekarang ini tidak akan jauh berbeda dengan keadaan masa-masa purbakala dahulu. Sehingga asumsi ini melahirkan teori yang ekstrim, bahwa maju mundur atau baik buruknya suatu bangsa akan ditentukan oleh keadaan pendidikan yang dijalani bangsa itu.¹

Dalam perkembangan kebudayaan manusia, tumbuhlah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih teratur, dan didasarkan atas pemikiran yang matang dan sistematis. Manusia ingin lebih mempertanggungjawabkan cara ia mendidik generasi penerusnya agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya dalam pertemanan dan perjalanannya dengan sesama dan dunia serta hubungannya dengan Tuhan. Karena sesungguhnya dalam dunia yang dinamis ini, masyarakat selalu mengalami perubahan. Bila tidak turut berubah dan mengikuti pertukaran zaman justru itu akan membahayakan eksistensi masyarakat itu sendiri.²

Secara historis, pada tahap-tahap awal pembelajaran di pesantren tidaklah begitu mulus, kendatipun didirikan dengan nama madrasah, semula yang dikehendaki ialah suatu lembaga pendidikan dengan sistem klasikal, yang didalamnya anak didik mendapatkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara berimbang. Tetapi pada prakteknya, hanya dicerminkan oleh sistem klasikalnya saja, sementara kurikulum yang diajarkan tetap semata-mata bidang studi agama. Karena itu banyak madrasah pada tahap-tahap awal ini tidak ada bedanya dengan pesantren tradisional yang sudah lama berjalan.³

Peran-pendidikan disamping berfungsi dalam mengembangkan kreatifitas dan produktifitas, juga berperan besar dalam upaya mengembangkan moralitas dan penanaman nilai-nilai, baik nilai-nilai insani maupun nilai-nilai illahi.⁴ Berkaitan dengan pentingnya nilai tradisi yang perlu diberikan kepada peserta didik, maka dalam tradisi pesantren dalam hal ini madrasah ada postulat yang telah menjadi moralitas pendidikan, yaitu; *“al-muhâfadat ‘alâ al-qadîm al-şâlih, wa al-*

¹ Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 8

² Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 23

³ Hasbulloh, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 70

⁴ Zakiah Dradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah* (Jakarta: Ruhama, 1994), 21

akhdh bi al-jadid al-aşlah” (melestarikan nilai-nilai lama yang positif, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih positif). Walaupun dalam Islam memiliki nilai-nilai samawi yang bersifat absolut dan universal, Islam masih mengakui adanya nilai tradisi masyarakat. Hal tersebut menurut Abdurrohman Wahid adalah karena tradisi merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lampau, yang harus dilestarikan sejauh mungkin, tanpa menghambat tumbuhnya kreativitas individual.⁵

Dengan demikian, pendidikan nilai bertujuan untuk mengukir akhlak melalui proses *knowing the good, loving the good, and acting the good*, yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi *habit of the mind, heart, and hands*. Sehingga pada akhirnya apa yang menjadi amanah tentang tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan “*Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara*”. Dapat dicapai sesuai dengan karakter bangsa ini.

Pendidikan Pesantren

Kenyataan bahwa Islam dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, khususnya penduduk pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dari proses panjang Islamisasi yang dilalui, dimana pesantren secara intensif terlibat didalamnya.⁶ Dan bahkan institusi pesantren dengan sistem pengajaran madrasahnyanya menjadi salah satu media utama dalam pembinaan moral bangsa sejak dahulu kala sampai sekarang. Terlebih lagi, pesantren terbukti mampu menunjukkan diri sebagai institusi yang tetap eksis dalam menghadapi segala bentuk dinamika perubahan sosial dengan dua karakter budaya pendidikannya, yaitu (1) Karakter budaya yang memungkinkan santri (siswa) belajar secara tuntas. Ketuntasan dalam belajar adalah sebuah keharusan sebagaimana diterapkan dalam

⁵ Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan* (Jakarta: Bappenas, 1981), 441

⁶ Hasan Mu'arif Ambariy, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), 318

kurikulum pendidikan nasional. Dimana ketuntasan yang diajarkan dalam pendidikan madrasatidak hanya terbatas pada transfer ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi juga aspek pembentukan kepribadian secara menyeluruh; dan (2) Kuatnya partisipasi masyarakat⁷.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai sejarah panjang dan unik. Secara historis, pesantren termasuk pendidikan Islam yang paling awal dan masih bertahan sampai sekarang. Berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang muncul kemudian, pesantren telah sangat berjasa dalam mencetak kader-kader ulama, dan kemudian berperan aktif dalam penyebaran agama Islam dan transfer ilmu pengetahuan. Namun, dalam perkembangan pesantren telah mengalami transformasi yang memungkinkannya kehilangan identitas jika nilai-nilai tradisonalnya tidak dilestarikan. Karena keunikannya itu maka pesantren hadir dalam berbagai situasi dan kondisi dan hampir dapat dipastikan bahwa lembaga ini, meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana dan karekteristik yang beragam, tidak pernah mati. Demikian pula semua komponen yang ada didalamnya seperti kyai atau ustad serta para santri senantiasa mengabdikan diri mereka demi kelangsungan pesantren.⁸ Selain itu Pesantren menekankan pendidikan dengan basis mengharusutamakan kecerdasan spiritual (SQ) disamping kecerdasan intelektual (IQ) dan emosional (EQ) bagi para santri. Sehingga para santri akan memiliki kecerdasan dan karakter yang kuat dan mudah bersosialisasi di masyarakat. Hal ini yang menyebabkan para santri lebih mudah diterima dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat.

Pendidikan pesantren umumnya dan seringnya dipandang sebagai basis Islam tradisional, yang berarti Islam dengan ciri yang masih terikat kuat oleh pemikiran ulama Abad pertengahan dimana itu dapat dibuktikan dan ditemukannya kitab-kitab klasik, yang lazim disebut *kitab kuning*. Dari sumber kitab kuning itu seorang santri mempelajari bukan hanya mengenai warisan yurisprudensi dimasa lampau atau tentang jalan terang untuk mencapai hakikat *'ubūdiyyah* kepada Tuhan melainkan juga mengenai peran-peran kehidupan dimasa depan bagi

⁷ Husni Rahim, *Arab Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 150-152

⁸ Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 100

suatu masyarakat.⁹ Disamping prestasi dan ke khasannya pesantren dalam menggali dan mengakrabi nilai-nilai universal dalam *kitab kuning*, pesantren dalam perjalanan sejarahnya hingga sekarang dinilai cukup berhasil mengukir prestasi dan ke khasan terutama yang menyangkut: (1) penghayatan mental spiritual keagamaan dan *tafaqquh fi al-din*; (2) pelestarian nilai-nilai keagamaan, seperti: kesederhanaan, keikhlasan, *ukhuwwah*, kebaktian, dan keswadayaan; (3) lebih condong pada pengutamakan *social effects* daripada *civil effects*; (4) kelahiran pemimpin, baik formal maupun nonformal yang berpengaruh bagi masyarakat dan lingkungannya; dan (5) penyebarluasan dakwah Islam yang telah melahirkan umat Islam Indonesia sebagai mayoritas dari tata susunan masyarakat bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, sangatlah wajar sekiranya pesantren kemudian banyak dirujuk, paling tidak kalau kita mau menoleh jauh kebelakang setelah pasca kemerdekaan, untuk dijadikan sebagai acuan alternatif dalam upaya menghadapi kebuntuan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional yang mana itu tidak sampai mencabut akar dari historis keIndonesiaan dan juga tidak mengurangi dari segi efisiensi dan efektivitasnya. Pesantren dengan cautious policy telah melakukan akomodasi dan transformasi sosio-kultural terhadap pola kehidupan masyarakat setempat. Secara historis, pesantren dinilai tidak hanya mengemban misi dan mengandung nuansa keislaman, tetapi juga menjaga nuansa keaslian (*indigenous*) Indonesia karena lembaga sejenis telah berdirisejak masa Hindu-Budha, sedangkan pesantren tinggal meneruskan dan mengislamkan saja.¹⁰

Terkait dengan hal itu, kemunculan madrasah didunia pesantren dipandang oleh banyak sejarawan pendidikan sebagai salah satu bentuk pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Argumen yang dapat dikemukakan adalah bahwa secara historis, awal kemunculan madrasah dapat dikembalikan pada dua situasi: (1) adanya pembaharuan Islam di Indonesia; dan (2) adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan

⁹ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 175

¹⁰ Nurcholis Madjid, "Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren" dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M 1985), 3

pendidikan Hindia-Belanda.¹¹ Maka dari itu, kalau dilihat dari sudut pandang pesantren sendiri maka kehadiran madrasah mengandung unsur dimensi “kritik” karena madrasah adalah bagaian dari upaya pembaharuan untuk menjembatani sistem tradisional yang diselenggarakan oleh pesantren dengan sistem pendidikan modern. Kehadiran pesantren dengan madrasahny merupakan upaya penyempurnaan terhadap sistem pesantren kearah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusnya memperoleh kesempatan yang sama dengan lulusan sekolah umum. Sementara itu, apabila dilihat dari sudut pandang pendidikan modern, kehadiran madrasah mengandung dimensi “akulturatif” karena madrasah merupakan manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam yang diinginkan oleh sebagian umat Islam yang telah menganggap positif sistem pendidikan modern atau sistem pendidikan Barat.

Tumbuh dan berkembangnya madrasah (pendidikan pesantren) ditanah air adalah hasil dari tarik-menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) yang sudah ada dengan pendidikan modern (Barat). Dari kemunculan madrasah ditanah air terdapat dua kecenderungan yang dapat diidentifikasi yaitu; madrasah *diniyyah salafiyah* yang terus tumbuh dan berkembang dengan peningkatan jumlah maupun penguatan kualitas sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din* (lembaga yang berorientasi mendalami agama) dan madrasah yang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, akan tetapi juga memasukkan beberapa materi yang diajarkan di sekolah-sekolah umum warisan pemerintah Hindia-Belanda. Mulai dari sinilah cikal bakal madrasah sebagai lembaga pendidikan warisan pesantren mulai ikut dan bergabung bahu membahu dalam membangun dan menyumbang generasi penerus bangsa lewat dunia pendidikan.

Belakangan, sejalan dengan banyaknya para ulama yang berguru ketanah suci, materi yang diajarkannya pun bervariasi. Dari sekian banyak tipe pondok pesantren, dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagai para santrinya, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk pondok pesantren: (1) Pondok Pesantren Salafiyah, yaitu yang menyelenggarakan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu

¹¹ Maksun, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) 82

agama Islam, serta kegiatan pendidikan dan pengajarannya sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. (2) Pondok Pesantren *Khalâfiyah*, yaitu pondok pesantren yang selain menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepesantrenan, juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal (sekolah atau madrasah). Pada mulanya kiai merupakan fungsionaris tunggal dalam pesantren. Semenjak berdirinya madrasah dalam lingkungan pesantren inilah, diperlukan sejumlah guru-guru untuk mengajarkan berbagai macam jenis pelajaran baru yang tidak semuanya dikuasai oleh kiai. Sehingga peran guru menjadi penting karena kemampuan yang dimilikinya dari pendidikan diluar pesantren. Dan sejak saat itu kiai tidak menjadi fungsionaris tunggal dalam pesantren. Mengikuti perkembangan zaman, beberapa pesantren mulai memasukkan pelajaran keterampilan sbagai salah satu materi yang diajarkan. Ada keterampilan berternak, bercocok tanam, menjahit berdagang dan lain sebagainya.¹²

Pendidikan Nasional

Pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan seluruh lapisan masyarakat. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹² H. Amin Haedani dkk, *Panorama, Pesantren Dalam Cakrawala Modern* (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), 130

Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.¹³

Pendidikan nasional sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri peserta didik harus tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman. Hal ini supaya pendidikan nasional tetap bisa eksis dan lebih jauh *survive* untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin global dan kompetitif. Akan tetapi, apabila dicermati secara lebih mendalam, pendidikan nasional yang berlangsung saat ini dalam dataran filosofis masih menjadi objek tarik menarik dari berbagai pihak. Adapun pendidikan nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia disusun dalam sebuah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional disusun sedemikian rupa, meskipun secara garis besar terdapat persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain. Hal ini dimaksudkan supaya sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa Indonesia yang secara geografis, demografis, historis, dan kultural memiliki ciri khas.¹⁴ Akan tetapi sistem pendidikan nasional (sisdiknas) yang sudah dibangun sejak dahulu hingga sekarang ini, pada kenyataannya belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa mendatang. Era reformasi yang sudah berupaya merekonstruksi sisdiknas pun harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan. Berdasarkan konteks historis, sisdiknas lebih menekankan pada kepentingan pemerintah (melestarikan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁴ Umar Tirtarahardja an SL. Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 263

status-quo kekuasaan) yang terpaksa harus melahirkan pendidikan yang sentralistis. Dengan atas nama keutuhan dan keselamatan negara seluruh kegiatan pendidikan dibalut dalam logika tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dengan bergantinya menteri pendidikan berganti pula sistem dan kurikulum yang dikeluarkan.

Kesimpulan

Pendidikan Pesantren memang menyimpan karakter yang cukup khas, tidak hanya dalam sistemnya, tetapi juga dalam perannya. Tujuan Utama Pendidikan Nasional menitik beratkan pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan YME, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam baik secara sosiologis maupun filosofis. Namun tujuan utama dari pendidikan nasional itu masih terbentur tembok besar bernama fakta dan realita yang menunjukkan kualitas lulusan lembaga pendidikan masih belum mencapai tujuan utama dari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu banyak orang berpikir bahwa “sekolah saja” tidak mungkin dapat diandalkan untuk mendidik manusia secara utuh.

Banyak yang mengeluh bahwa akhlak dan prilaku pelajar dewasa ini cenderung merosot dengan berbagai bentuk tindakannya yang merisaukan banyak pihak. Karena itu, patut dipikirkan kemungkinan “pesantren masuk sekolah”. Disinilah pendidikan Pesantren pasti akan diuji eksistensinya seputar ihwal apakah mampu menjadi alternatif dari kebuntuan tersebut. Serta akan semakin mengukuhkan kemampuan pesantren dalam mewujudkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya.

Secara tradisional, pesantren dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama yang terangkum dalam kitab kuning yang diajarkan dengan metode satu arah baik itu metode pembelajaran sorogan ataupun bandongan. Pesantren lumrahnya tidak hanya menekankan pada pendidikan saja namun juga mengemban misi sosial masyarakat serta Islamisasi, Meski beberapa pesantren baru didirikan dengan menetapkan pendidikan sebagai satu-satunya wilayah garapannya, kecenderungan untuk mendefinisikan fungsi dan peran pesantren hanya dalam lingkup pendidikan sebetulnya tidak mempunyai latar historis yang kuat. Sekalipun demikian perhatian

masyarakat tentang dunia pendidikan di pesantren tidaklah begitu besar mungkin karena adanya pendapat bahwa pesantren bukanlah pendidikan formal atau kecenderungan dari pesantren untuk bersikap menutup diri terhadap perubahan di sekelilingnya dan sikap kolot dalam merespon upaya modernisasi.

Pondok pesantren sebagai sub-sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan bagian integral dari lembaga keagamaan yang secara unik memiliki potensi yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal tersebut dapat disimak dari uraian sebelumnya bahwa eksistensi pondok pesantren yang menegaskan bahwa dari segi manajemen dan pengelolaannya bersentuhan langsung dengan pendekatan keagamaan. Ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang beberapa pasalnya menekankan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, seperti, pasal 30 ayat (1) bahwa: *“Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.”*¹⁵

Pendidikan keagamaan yang dimaksud di atas, adalah pondok pesantren sebagaimana yang diatur dalam PP. 55 pasal 26 ayat (2) yang menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah. Di samping itu pondok pesantren yang tujuannya untuk menciptakan insan yang takwa serta komponen lainnya sebagai manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan merupakan indikator utama mengenai peran pesantren dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari segi kontekstualisasi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pada bab II tentang “Dasar, Fungsi dan Tujuan” di mana UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tersebut, terdiri dari dua pasal yakni pasal 2 dan 3. Dua pasal dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, secara berturut-turut menjelaskan tentang “dasar pendidikan nasional”, yakni UUD 1945, kemudian “fungsi dan tujuan pendidikan nasional” yakni: “Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003*. (Bandung: Fokusmedia, 2003), Cet.II.

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa inti utama tujuan pendidikan nasional kita adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menjadi tujuan pondok pesantren.

Dalam upaya pengembangan pondok pesantren, tampaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pengembangan dari segi eksternal dan dari segi internal. Pengembangan dari aspek eksternal dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu; (1) Tetap menjaga agar citra pondok pesantren dimata masyarakat. Khususnya, mutu keluaran atau output pondok harus mempunyai nilai tambah dari keluaran pendidikan lainnya yang sederajat; (2) Santri-santri dalam pondok hendaknya dipersiapkan untuk mampu berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk. Setidaknya proses itu dapat dimulai sejak awal hingga diprediksi tingkat kekompetensinya sudah mampu; (3) Pondok hendaknya terbuka terhadap setiap perkembangan pengetahuan dan temuan-temuan ilmiah dalam masyarakat, termasuk temuan baru dalam dunia pendidikan. Sedangkan pengembangan dari segi internal yang dapat dilakukan, yaitu;

Pertama, kurikulum pondok pesantren harus menepis anggapan yang bersifat dikotomi dan memisahkan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Dalam konteks kekinian, kurikulum sebaiknya berdiferensiasi, yaitu kurikulum yang direncanakan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan anak didik, kurikulum ini sekaligus dapat menyatuhkan dengan baik antara aspek intelektual emosional, agama spritual, dan kinerja psikomotor; *Kedua*, tenaga pengajar pada pondok pesantren. Untuk pengembangan dimasa mendatang, kiranya perlu kriteria-kriteria khusus dalam merekrut tenaga pengajar. Setidaknya, ia mempunyai pengetahuan agama yang cukup mantap, namun juga profesional dalam bidang ilmu yang diajarkan dan memiliki kemampuan mentransfer ilmunya dengan baik sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru atau kyainya; *Ketiga*, sarana pendidikan di pondok, karena sarana sangat menentukan, hampir bisa dipastikan dengan sarana yang lengkap

dapat mencapai hasil yang maksimal. Misalnya ruang belajar yang baik, perpustakaan yang lengkap dan media belajar yang lainnya. Dengan mengembangkan pondok pesantren dari segi internal dan eksternalnya akan memberikan warna dan corak khas dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia, apalagi secara kultural pondok pesantren telah diterima dan ikut serta membentuk dan memberikan peran dalam kehidupandan pemberdayaan masyarakat. Fungsinya sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia dianggap banyak memberikan andil dalam perjalanan bangsa dan kenegaraan, baik pada masa kolonial hingga sekarang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa eksistensi lembaga pendidikan pesantren masih dibutuhkan dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan bangsa. Akhirnya, warga masih tetap diberikan pilihan untuk menyekolahkan putra putri mereka di lembaga pendidikan yang diinginkan, termasuk pilihannya ke pesantren. Potensi pondok pesantren dalam upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk upaya transformasi sosial, sangatlah besar. Setidaknya ada beberapa alasan, yaitu: *Pertama*; potensi kuantitatif yang dapat diberdayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Kedua*; Keterikatan pondok pesantren dengan masyarakat yang sangat mengakar melalui kharisma kyainya sekaligus tempat kepercayaan masyarakat pendukungnya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pondok pesantren sekarang ini. *Ketiga*; Upaya pemberdayaan pondok pesantren sebagai pusat pengembangan potensi umat, menjadikan sasaran pembangunan pendidikan nasional yang signifikan. *Keempat*; Sebagai lembaga pengembangan dan pembentukan watak, pesantren dapat terus berdampingan hidup dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ambary, Hasan Mu'arif. *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003*. Bandung: Fokusmedia, 2003. Cet. II.
- Dradjat, Zakiah. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Ruhama, 1994.
- Haedani, H. Amin dkk. *Panorama, Pesantren Dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka, 2004.
- Hasbulloh. *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Madjid, Nurcholis. "Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren" dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M, 1985.
- Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Nata, Abudin. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tirtarahardja, Umar, dan SL. Sulo. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Usa, Muslih. *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS, 200.
- _____. *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Bappenas, 1981.